

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI  
DI KECAMATAN BENTENG  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ANDI NURUL HUDAYAH

NPP. 30.1174

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Kebijakan Publik*

[nurulhdayah4@gmail.com](mailto:nurulhdayah4@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Asri Hadi, MA

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** *The main problem related to this program is that the implementation of the program is still hampered because the distance of each district is far and separated by islands besides that it is not in accordance with the technical implementation guidelines. For example, the program implementation period has set a time limit for rehabilitating houses, but in reality the program implementation time exceeds the specified time. This happened because of regional/local characteristics that implemented house construction based on auspicious days that were applied by the people of the Selayar Islands Regency, including those in Benteng District. Benteng District is one of 11 Districts in Selayar Islands Regency which is the Regency Capital. **Purpose:** the purpose of this research is to identify the implementation of the Social Rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Benteng District, Selayar Islands Regency, South Sulawesi Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach and data collection techniques used are observation, documentation, and interviews. The theory used to answer how this program is implemented and the inhibiting factors for implementing the program uses the theory of Charles O.Jones. **Results/Findings:** Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses is carried out with the aim of tackling social problems that occur by tackling improving people's living standards through the provision of livable houses in Selayar Islands Regency. The aim of this policy was made so that the poor have a place to live that meets health, safety and social requirements. **Conclusion:** In practice, livable houses for the poor have been built but have not met the building safety criteria. So the researchers concluded that the implementation of the RS-RTLH Program had not been maximized.*

**Keywords:** *Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses, Implementation, Inhibiting*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan pokok terkait dengan program ini yaitu masih terkendalanya pelaksanaan program karena jarak tiap kabupaten yang jauh dan terpisahkan oleh pulau selain itu kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti jangka waktu pelaksanaan program yang telah ditetapkan batas waktu untuk merehabilitasi rumah, namun pada kenyataannya waktu dalam pelaksanaan program melebihi waktu yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya karakteristik daerah/lokal yang menerapkan pembangunan rumah berdasarkan hari baik yang diterapkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk di Kecamatan Benteng. Kecamatan Benteng merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi Ibukota Kabupaten. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teori yang digunakan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan program ini serta faktor penghambat pelaksanaan program menggunakan teori Charles O.Jones. **Hasil/Temuan:** Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan tujuan menanggulangi masalah sosial yang terjadi dengan penanggulangan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan kebijakan ini dibuat agar para masyarakat miskin memiliki tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaannya telah terbangun rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin namun belum memenuhi kriteria keselamatan bangunan. Sehingga peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan Program RS-RTLH belum maksimal.

**Kata Kunci :** Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Implementasi, Faktor Penghambat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan sosial (social welfare state) seperti yang dirumuskan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan identik dengan kondisi aman, nyaman dan bahagia. Sehingga disetiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, kesejahteraan dijadikan sebagai tujuan akhir. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tingkat kemiskinan.

Kemiskinan adalah permasalahan global yang ada di setiap negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan pengetahuan tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas.

Memiliki tempat tinggal yang layak huni merupakan hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Sehingga setiap warga negara berhak untuk memiliki rumah, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Pada tahun 2011, Pemerintah membuat program yang fokus memenuhi kebutuhan papan masyarakat yaitu tempat tinggal yang layak oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dikhususkan kepada rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah membuat regulasi yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Atas dasar Peraturan Bupati tersebut maka Pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan harapan dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah yang memenuhi standar layak huni serta membangun kapasitas kelompok fakir miskin dalam memahami dan menyadari pentingnya tempat tinggal yang layak huni.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Keberadaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni setidaknya dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

### Realisasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Selayar (Unit)

Tahun	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah yang Direhabilitasi	Jumlah yang Belum Terealisasi
2018	1.300	492	808
2019	540	119	421
2020	600	584	416

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2018 sebanyak 1.300 dan jumlah rumah yang berhasil direhabilitasi berjumlah 492. Kemudian tahun 2019, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 540 dan jumlah rumah yang mendapatkan bantuan program tersebut berjumlah 119. Untuk tahun 2020, jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 600 sedangkan jumlah rumah yang direhabilitasi sebanyak 584. Dapat dilihat dari tabel tersebut, jumlah rumah tidak layak huni semakin berkurang dari tahun ke tahun. Namun, masih ada rumah yang belum mendapatkan bantuan. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari salah satu staf Dinas Sosial, hal tersebut disebabkan karena banyak kecamatan luar pulau yang tidak memperoleh bantuan karena akses bantuan ke pulau susah. Sehingga memperlambat jalannya penyaluran bantuan.

Permasalahan pokok terkait dengan program ini yaitu masih terkendalanya pelaksanaan program karena jarak tiap kabupaten yang jauh dan terpisahkan oleh pulau selain itu kurang

sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti jangka waktu pelaksanaan program yang telah ditetapkan batas waktu untuk merehabilitasi rumah, namun pada kenyataannya waktu dalam pelaksanaan program melebihi waktu yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya karakteristik daerah/lokal yang menerapkan pembangunan rumah berdasarkan hari baik yang diterapkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk di Kecamatan Benteng. Kecamatan Benteng merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi Ibukota Kabupaten.

### **1.3 Deskripsi Penelitian Sebelumnya**

Deskripsi penelitian sebelumnya merupakan penjelasan singkat dari penelitianpenelitian terdahulu yang memiliki isu masalah yang kurang lebih sama dengan penelitian yang sedang ditulis dan dijadikan acuan oleh peneliti sebagai referensi, penelitian tersebut kemudian dimasukkan dalam bagian deskripsi penelitian terdahulu dalam bentuk pencegahan agar penelitian dibuat tidak termasuk dalam pelanggaran plagiarisme. Deskripsi penelitian sebelumnya dapat diambil dari jurnal, artikel, ataupun skripsi. Adapun penelitian sebelumnya yang peneliti jadikan sebagai pedoman atau acuan untuk membuat penelitian adalah sebagai berikut.

Yang pertama yaitu Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Di Kota Serang : tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor determinan pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil dari penelitian tersebut melalui Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) telah dilaksanakan di Kota Serang dengan jumlah penerima bantuan yang sangat minim sesuai serta ketidakmampuan warga miskin dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan. Serta Alokasi anggaran untuk Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Serang sangat terbatas sehingga membutuhkan swadaya dari masyarakat. (Fajar, 2014)

Selanjutnya, Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian merupakan masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni. Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Sekretris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, Staf, Kepala Desa Nyanggai dan Warga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Semarang yang sudah berjalan dengan baik, sehingga disarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan. (Putri, 2022)

Yang ketiga, Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bandung Barat (Studi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat). Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian tentang evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil pencapaian program dengan tujuan yang hendak dicapai pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 tidak menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat. (Alam, 2017)

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas secara spesifik implementasi kebijakan sesuai dengan penjabaran latar belakang yang sudah disampaikan, sehingga dilakukan sebuah penulisan yang berjudul **"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan"**.

#### **1.5 Tujuan**

Sesuai dengan perumusan permasalahan yang dijabarkan, sehingga penulisan yang dilakukan bertujuan untuk:

- 1) Guna mengidentifikasi implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Guna mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya dalam mengatasinya dalam Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut dikarenakan berdasarkan judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, faktor penghambat serta upaya mengatasinya dan untuk menjelaskan hal tersebut maka peneliti membutuhkan data yang ada di daerah tersebut, oleh karena alasan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara beberapa sampel dan data dalam bentuk dokumen.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan merupakan bagian dari kajian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data. Peneliti mendasarkan analisis datanya pada hasil wawancara yang diolah menjadi data tunggal dan fakta utuh. Data dan fakta yang diolah merupakan hasil penelitian langsung oleh para peneliti di bidang ini, berdasarkan teori yang mereka gunakan. Temuan disajikan dalam bentuk deskriptif dalam bentuk deskripsi dan kutipan langsung ke narasumber.

peneliti melakukan kajian terhadap implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan berdasar pada teori Charles O. Jones . Teori tersebut menetapkan 3 (tiga) dimensi dalam implementasi kebijakan yang kemudian peneliti kaitkan dengan implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

#### 3.1 Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Kebijakan penanggulangan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43 Tahun 2020 untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada pembahasan ini peneliti menggunakan fakta-fakta yang peneliti dapatkan di lapangan melalui observasi serta diperkuat dengan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Peneliti menggabungkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dan disesuaikan dengan teori implementasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones.

Keberhasilan sebuah kebijakan menurut Charles O. Jones dipengaruhi oleh 3 dimensi yaitu organisasi merupakan pembentukan sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan memberikan hasil ataupun dampak, interpretasi yaitu menganalisis bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan, kemudian aplikasi atau penerapan yaitu ketentuan kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program.

##### 3.1.1 Organisasi

###### 1. Sumber daya manusia

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program karena Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pegawai yang cukup namun untuk tim pelaksana dirasa masih terbatas dan tenaga kerja yang tidak masuk dalam anggaran sehingga program ini dilaksanakan dengan swadaya masyarakat.

###### 2. Struktur organisasi pelaksana, tugas pokok dan fungsinya

Tim pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni karena kerjasama dan koordinasi yang baik antara masing-masing tim pelaksana akan menciptakan suasana yang baik dan berdampak pada pelaksanaan program yang baik pula.

### 3. Kelengkapan sarana dan prasarana, biaya operasional

sarana dan prasarana berupa dana atau bahan material merupakan faktor penghambat karena bantuan senilai Rp. 10.000.000,- tidak cukup untuk memperbaiki rumah dibutuhkan tambahan biaya untuk menciptakan rumah layak huni dari segi keselamatan bangunan sementara dana ini sama sekali tidak mencukupi untuk menciptakan rumah layak huni dari segi kesehatan dan keselamatan. Sehingga tidak mampu mewujudkan salah satu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menciptakan rumah layak huni dengan kriteria keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas.

#### **3.1.2 Interpretasi**

##### 1. Komunikasi antara pelaksana dan masyarakat

Komunikasi antara pelaksana dan masyarakat, merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan program karena sosialisasi sudah dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara pelaksana dan masyarakat sehingga masyarakat paham bagaimana mekanisme dalam proses penyaluran bantuan ini.

##### 2. Kesesuaian pelaksanaan dan peraturan

Kesesuaian antara pelaksanaan dan peraturan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program seluruh tim pelaksana dapat menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan.

#### **3.1.3 Aplikasi**

##### 1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program karena jiwa gotong royong masyarakat sekitar yang masih kurang sehingga para penerima bantuan lebih memilih untuk dikerjakan sendiri.

##### 2. Kualitas bangunan

Untuk kualitas bangunan belum memenuhi apa yang menjadi tujuan terlaksananya program ini yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menciptakan rumah layak huni dengan kriteria keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

##### 1. Sumber daya manusia yang kurang

Sumber daya manusia tentu bukanlah hal yang mudah untuk diatasi karena perubahan kemampuan atau keterampilan tidak bisa langsung terbentuk, dibutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi sumber daya tenaga. Kurangnya sumber daya manusia berupa tenaga kerja akan sedikit menghambat proses pelaksanaan program rutilahu.

## 2. Sarana dan prasarana terbatas

Faktor sarana dan prasarana yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini. Dalam proses pelaksanaan, para panitia tidak bisa memprediksi cuaca. Sehingga saat cuaca kurang bersahabat atau hujan, proses pengerjaan akan ditunda dan berdampak pada durasi pengerjaan rumah yang sedikit lebih lama dan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

## 3. Terbatasnya alokasi anggaran

Karena alokasi anggaran yang dianggap kurang sehingga program ini tidak mampu mewujudkan salah satu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menciptakan rumah layak huni dengan kriteria keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas.

## 4. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang berpengaruh karena sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020, bahwa pelaksanaan perbaikan rumah ini dilaksanakan dengan swadaya masyarakat atau gotong royong. Apabila masyarakat kurang berpartisipasi, akan menghambat jalannya program ini.

### **3.3 Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat pada Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

Setiap pelaksanaan suatu kebijakan pasti memiliki hambatan, begitu pula yang terjadi pada Dinas Sosial dalam pelaksanaan program rutilahu dihadapkan dengan masalah yang bisa menghambat terlaksananya suatu kebijakan dengan baik. Maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya, yaitu:

1. Karena kondisi alam dan lingkungan yang tidak menentu, pemerintah mungkin tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi tantangan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana. Tetapi tim pelaksana bekerja keras untuk memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terlepas dari kondisi cuaca yang buruk, tim pelaksana program rehabilitasi sedang berupaya untuk mendapatkan sarana dan prasarana semaksimal mungkin..
2. Langkah selanjutnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya gotong royong. Karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sehingga para penerima bantuan harus saling tolong menolong.
3. Untuk optimalisasi anggaran program ini tim pelaksana belum menemukan upaya untuk mengatasinya.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**



Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan tujuan menanggulangi masalah sosial yang terjadi dengan penanggulangan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan kebijakan ini dibuat agar para masyarakat miskin memiliki tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu memiliki kesamaan judul mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Kesamaan yang lain terletak pada metode penelitian yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kedua memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program serta upaya untuk mengatasinya.

Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Adi Fajar (2014) dalam bentuk skripsi, menggunakan Teori Implementasi Jones dengan dimensi Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Nabila Putri (2022) dalam bentuk jurnal, menggunakan Teori Implementasi Edwards III dengan dimensinya yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menciptakan rumah yang layak huni terdapat beberapa kesimpulan yang telah disusun oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dinilai dengan menggunakan teori implementasi Charles O.Jones yang terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi organisasi, interpretasi dan penerapan. Dalam pelaksanaannya telah terbangun rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin namun belum memenuhi kriteria keselamatan bangunan. Sehingga peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan Program RS-RTLH belum maksimal.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni antara lain, sumber daya manusia yang kurang, sarana prasarana yang terbatas, terbatasnya alokasi anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial selaku tim pelaksana berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya gotong royong

**Keterbatasan Penelitian :** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah masa depan penelitian (future work) :** penulis menyadari masih kurangnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian berkelanjutan agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan tersebut penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi, serta kedua orang tua penulis alm bapak Hasbullah Johanna dan ibu Andi Malawanti yang telah mendukung dengan sangat luar biasa dan yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih terhadap pihak pihak terkait khususnya yang telah membantu penulis selama proses penulisan serta penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Fajar, A. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Di Kota Serang*.

Putri, N. (2022). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*.

Alam, 2017. *Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bandung Barat (Studi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)*

<https://kbbi.web.id/sosial>, diakses tanggal 26 Oktober pukul 13:38

